

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Kebijakan Luar Negeri

Ada banyak definisi atau pengertian tentang luar negeri. Menurut Thomas Diez, et al. dalam Bakry (2017) Politik luar negeri mengacu pada kebijakan suatu negara yang ditujukan untuk pemain asing, khususnya negara lain. Christopher Hill dalam Bakry (2017) juga secara ringkas menggambarkan politik luar negeri sebagai keseluruhan interaksi yang dilakukan oleh para aktor independen dalam hubungan internasional dalam hubungan eksternal yang resmi (Bakry, 2017).

Ada banyak definisi atau pengertian tentang kebijakan luar negeri. Menurut Thomas Diez, et al. dalam Bakry (2017) yakni kebijakan luar negeri mengacu pada tindakan suatu negara yang ditujukan untuk pemain asing, khususnya negara lain. Christopher Hill dalam Bakry (2017) juga secara ringkas menggambarkan kebijakan luar negeri sebagai keseluruhan interaksi yang dilakukan oleh para aktor independen dalam hubungan internasional dalam hubungan eksternal yang resmi (Bakry, 2017).

Amstutz (1995) dalam Jemadu (2008) mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai kumpulan kegiatan dan pilihan yang diambil oleh pemerintah untuk memajukan kepentingan nasionalnya melampaui batas-batasnya. Politik luar negeri adalah proses yang rumit dan dinamis yang didorong oleh sejumlah elemen seperti

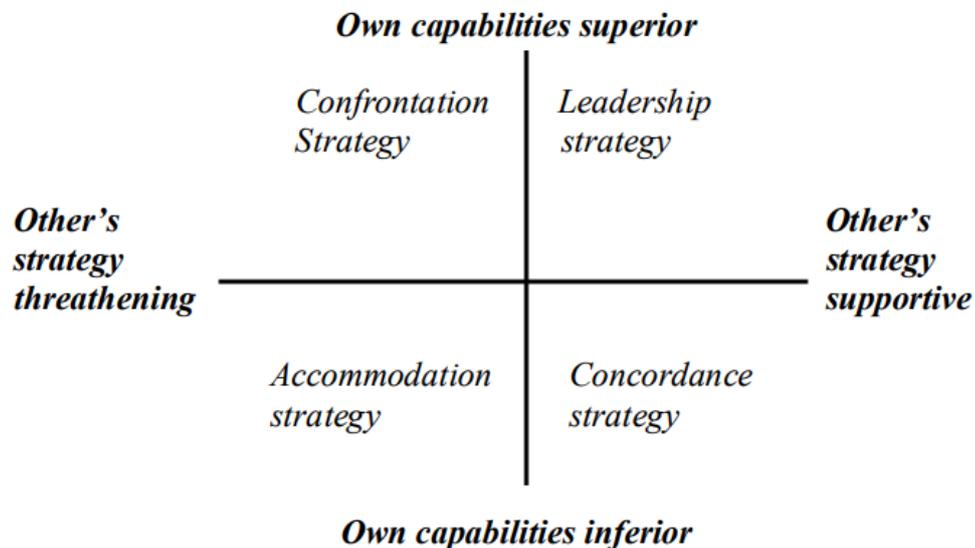
sejarah negara, budaya, cita-cita, dan kepentingan ekonomi. Kebijakan luar negeri Kegley dan Wittkopf (2003) dalam Jemadu (2008) juga mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai keputusan yang dibuat oleh otoritas pemerintahan untuk mewujudkan tujuan internasional. Mereka menyarankan bahwa studi kebijakan luar negeri harus memperhatikan prinsip-prinsip yang mendukung tujuan suatu negara serta cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. (Jemadu, 2008, p. 64).

Dari penjabaran diatas, politik luar negeri dapat didefinisikan sebagai serangkaian kebijakan, interaksi, dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk terlibat dengan entitas asing, khususnya negara lain. Ini mencakup keterlibatan komprehensif yang dilakukan oleh aktor independen dalam hubungan internasional, khususnya dalam hubungan eksternal resmi.

2.1.1.1.Perspektif Perumusan Kebijakan Luar Negeri

Merujuk kepada Yani (2008), terdapat lima perspektif dalam kebijakan luar negeri, yakni (1) model strategis/rasional, (2) model pembuat keputusan (decision making) (3) model politik birokratis (4) model adaptif, dan (5) model incremental

1. Model Strategis/Rasional



Gambar 2 1 Model Politik Luar Negeri Strategis

Sumber: (Yani, 2008)

Perspektif politik luar negeri model strategis mengasumsikan negara-negara bertindak secara rasional untuk mencapai tujuan mereka dalam politik global. Faktor-faktor seperti struktur sistem internasional, persepsi elit, strategi negara-bangsa lain, dan kapabilitas negara mempengaruhi interaksi antar negara. Ada empat strategi utama: leadership strategy (pengawasan melalui persuasi), concordance strategy (kepentingan saling menguntungkan), confrontation strategy (mempertajam isu konflik), dan accommodation strategy (penyesuaian untuk menghindari konflik). Model ini memiliki kelemahan dalam asumsi perhitungan rasional dari pembuat keputusan. Rasionalitas terjadi ketika pembuat keputusan memilih alternatif terbaik berdasarkan informasi yang ada (Yani, 2008).

2. Model Decision-Making

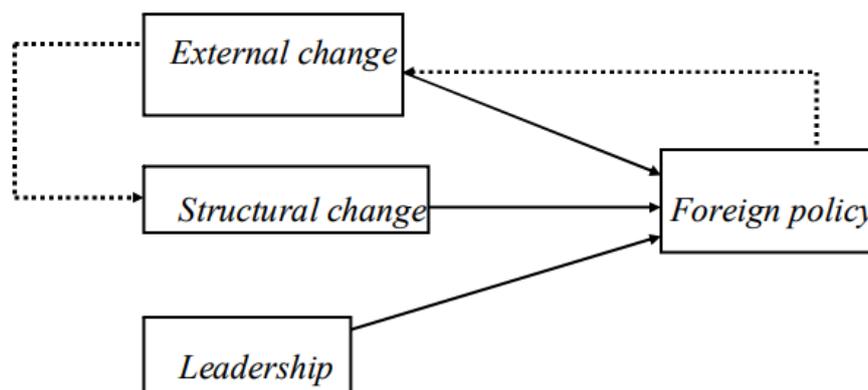
Richard Snyder, et al dalam Yani (2008) mengusulkan pendekatan yang lebih kompleks dalam memahami perumusan kebijakan luar negeri. Mereka menekankan bahwa faktor internal dan eksternal memiliki pengaruh pada perilaku politik suatu negara. Perspektif ini melibatkan analisis jaringan birokrasi dan prosedur kelembagaan dalam pengambilan keputusan politik luar negeri. Mereka menyoroti motivasi pembuat keputusan, aliran informasi, pengaruh kebijakan luar negeri, dan situasi saat pengambilan keputusan sebagai faktor kunci dalam menjelaskan kebijakan luar negeri. Model ini memberikan penekanan pada dimensi manusia yang dianggap lebih efektif daripada proses politik luar negeri itu sendiri. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara dan menekankan pentingnya konteks situasional dalam pengambilan keputusan, baik dalam keadaan krisis maupun tidak (Yani, 2008).

3. Model Birokratis

Model ini mengedepankan peran birokrat dalam proses kebijakan luar negeri, tidak hanya fokus pada pusat pembuat keputusan politik negara. Hal ini menunjukkan bahwa birokrat memiliki pengaruh besar dalam merumuskan kebijakan luar negeri dan juga bertanggung jawab dalam implementasinya. Model ini melihat pemerintah sebagai kolektif individu dan organisasi, sehingga keputusan politik bukanlah hasil dari rasionalitas semata, melainkan produk dari interaksi, negosiasi, kompromi, dan penyesuaian di antara individu dan organisasi yang

terlibat. Dengan demikian, politik luar negeri dipahami sebagai proses politik yang melibatkan berbagai tindakan rundingan, kompromi, dan penyesuaian (Yani, 2008).

4. Model Adaptif



Gambar 2 2 Model Politik Luar Negeri Adaptif

Sumber: (Yani, 2008)

Beberapa pemikir yang mempelajari kebijakan luar negeri berfokus pada bagaimana negara-negara merespons kendala dan peluang yang ada dalam lingkungannya. Mereka menekankan bahwa kebijakan luar negeri tidak terbatas dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Model adaptif memisahkan pilihan politik luar negeri berdasarkan perkiraan kapabilitas dan posisi geopolitik suatu negara. Pola adaptasi politik luar negeri dapat mengarah pada perubahan atau kesinambungan kebijakan luar negeri. Model ini memungkinkan perbandingan negara dalam menghadapi peluang dan hambatan, serta membangun teori yang menguji hipotesis. James Rosenau merupakan salah satu tokoh yang berkontribusi

dalam mengembangkan teori politik luar negeri dalam konteks transnasionalisme dan saling ketergantungan (Yani, 2008).

5. Model Incremental

Model ini melihat keputusan kebijakan luar negeri sebagai proses bertahap yang melibatkan penambahan-penambahan kecil. Ketidakpastian dan kurangnya informasi yang lengkap dalam menghadapi tantangan eksternal membuat keputusan politik luar negeri tidak dapat didasarkan pada perhitungan rasional yang menyeluruh. Oleh karena itu, pembuat keputusan tidak mempertimbangkan semua pilihan yang ada. Keputusan yang diambil seringkali bukan berdasarkan apa yang paling rasional untuk memecahkan masalah, tetapi lebih pada pilihan yang dapat diterima oleh para pembuat keputusan (Yani, 2008).

2.1.2. Keamanan

Pemaknaan terkait keamanan pada dewasa ini sering digambarkan sebagai konsep yang menantang secara argumentatif. Alasan mengenai keamanan merupakan konsep yang menantang karena Jervis dalam Yani, et al. (2017) menjelaskan bahwa keamanan adalah istilah mengenai apa yang orang rasakan. Terlepas apa yang menjadi justifikasi rasa aman tersebut. Keamanan erat kaitannya dengan perasaan yang dipersepsikan oleh kelompok masyarakat mengenai kondisi lingkungan dimana mereka tinggal. Pemaknaan keamanan sendiri bermula dari Bahasa Latin “securus” yang berarti bebas dari marabahaya dan ketakutan. Dalam hal ini, makna keamanan didefinisikan sebagai kebebasan dari berbagai macam

ancaman dan rasa takut baik dari individu, kelompok maupun negara (Yani et al., 2017, pp. 1–3)

Studi Keamanan dalam Hubungan Internasional erat kaitannya dengan interaksi antar actor, baik itu actor negara (*state actors*) maupun actor non-negara (*non-state actors*). Studi Keamanan memperhatikan dirinya sendiri dengan sub-set dari interaksi politik yang ditandai dengan kepentingan khusus mereka dalam hal menjaga keamanan para aktor dan orang-orang. Dimana garis demarkasi sub-disiplin Ilmu Hubungan Internasional akan ditarik semakin kontroversial, seperti halnya demarkasi Hubungan Internasional dalam kaitannya dengan ranah Ilmu Politik yang lebih luas (Hough, 2018, p. 2).

Dalam perkembangannya, studi keamanan sebagai sub-kajian Hubungan Internasional membagi dirinya atas dua era. Yang pertama adalah pada era Perang Dingin. Pada era ini studi keamanan sangat berfokus terhadap isu keamanan yang *nation-centric*. Dalam hal ini, pengukuran risiko keamanan berfokus pada aspek nasional seperti ancaman perang. Hal itu dapat dipahami karena pada masa itu terdapat dua kutub kekuatan dunia (*bipolar*) yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada masa ini juga, konsep keamanan dikenal sebagai keamanan tradisional. Yang kedua adalah era pasca Perang Dingin. Pada masa ini terdapat perluasan pemaknaan akan keamanan dimana ancaman keamanan kini bukan hanya soal ancaman perang, tetapi juga ancaman ekonomi dan lingkungan hidup. Sehingga perluasan atas isu-isu tersebut juga dikenal sebagai keamanan non-tradisional. Selain itu, terdapat klasifikasi dalam Keamanan merujuk kepada skalanya, diantaranya adalah keamanan nasional dan keamanan regional (Bakry, 2017).

2.1.2.1.Keamanan Nasional

Keamanan nasional mengacu pada kemampuan suatu negara untuk menjaga kedaulatan dan integritas teritorialnya terhadap bahaya eksternal. Sejak Traktat Westphalia ditandatangani pada tahun 1648, negara telah mengambil peran sentral dalam hubungan internasional, memegang otoritas tertinggi di antara para aktor di arena global (Yani et al., 2017).

Neorealisme, sebagai teori hubungan internasional, menegaskan bahwa negara adalah aktor utama dalam sistem internasional dan didorong oleh upaya memaksimalkan kekuasaan. Neorealis berpendapat bahwa sistem internasional tidak memiliki otoritas pemerintahan pusat, yang mengakibatkan lingkungan anarkis. Ketiadaan ketertiban ini menimbulkan keadaan tidak aman, yang mengharuskan kewaspadaan terus-menerus di antara negara-negara untuk melawan potensi ancaman dari negara-negara lain. Menurut kaum neorealis, politik internasional dicirikan oleh persaingan dalam berbagai bidang dan bentuk, bukan peperangan yang terus-menerus. Mereka mengakui kemungkinan kerjasama antar negara, meskipun dibatasi oleh sifat anarkis dari sistem internasional (Hadiwiyata, 2017).

2.1.2.2.Keamanan Regional

Keamanan regional adalah keadaan keamanan di suatu wilayah tertentu. Hal ini didasarkan pada persepsi ancaman oleh negara-negara di kawasan tersebut. Setiap negara memiliki persepsi keamanannya masing-masing, yang dipengaruhi oleh kekuatan, kemampuan, dan kepentingan

nasionalnya. Dalam konteks hubungan internasional, istilah “regional” mengacu pada hubungan antar negara atau kelompok negara yang mirip atau dekat satu sama lain. Pengelompokan ini dapat didasarkan pada kedekatan geografis, orientasi politik, ideologi, aliansi, kondisi ekonomi, atau frekuensi interaksi atau mobilitas antar negara. Keamanan kawasan merupakan isu yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain persepsi negara di kawasan, kekuatan dan kemampuan negara tersebut, serta ancaman yang dihadapi..

2.1.2.3. *Military Power* sebagai Keamanan Tradisional

Kekuatan militer merupakan komponen kunci dari kekuasaan negara. Ini sangat ditentukan oleh ukuran dan kekuatan angkatan bersenjata suatu negara, termasuk angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan persenjataan nuklirnya (Yani et al., 2017). Hans J. Morgenthau, seorang ilmuwan politik terkenal, menyatakan dalam bukunya “Politics Among Nations” bahwa kekuatan militer merupakan faktor terpenting dalam kemampuan suatu negara untuk mencapai tujuannya. Dia berargumen bahwa kekuatan militer sangat penting bagi suatu negara untuk melindungi kedaulatan, integritas teritorial, dan kepentingan nasionalnya (Burchill & Linklater, 2015).

Kesiapan militer sebuah negara merupakan elemen dari kekuatan negara. Kesiapan militer negara ini juga didukung oleh elemen kekuatan negara yang lainnya seperti sumber daya alam dan kapasitas industri. Barang mentah yang dimiliki negara seperti minyak dan uranium digunakan sebagai

dasar dari pembuatan persenjataan dan artileri peperangan. Semakin besar kapasitas industri sebuah negara maka semakin besar juga kekuatan yang akan dimiliki sebuah negara. Industri yang berkembang dapat memudahkan negara untuk mengembangkan teknologi persenjataan yang dapat mendukung kemampuan militer miliknya. Selain itu, kesiapan militer sebuah negara juga bergantung pada jumlah senjata dan tentara yang dimilikinya (Yani et al., 2017, p. 21).

2.1.3. Deterensi

Deterensi dan diferensiasi antara kemampuan menghukum dan bertahan sangat penting untuk menggambarkan berbagai cara tekanan koersif dapat diberikan. Deterensi adalah salah satu bentuk paksaan. Suatu negara menghalangi musuh untuk melakukan sesuatu seperti menyerang dengan meyakinkannya bahwa biaya untuk melakukannya akan lebih besar daripada potensi keuntungannya. Kemampuan defensif suatu negara adalah kemampuan fisik negara untuk membatasi biaya yang dapat dibebankan oleh musuh kepadanya. Semakin besar kemampuan pertahanan suatu negara, semakin sedikit musuh yang dapat melukainya. Selain dapat membatasi biaya yang dapat dibebankan oleh musuh padanya, negara mungkin dapat membebankan biaya pada musuh. Biaya ini mungkin termasuk invasi dan pendudukan beberapa wilayahnya, penghancuran kekuatan militernya, penghancuran beberapa kemampuan industrinya, atau, lebih sederhana dan mengerikan, pembunuhan beberapa orangnya. Kemampuan hukuman suatu negara adalah kemampuannya untuk menimbulkan biaya pada

musuh. Semakin besar kemampuan menghukum suatu negara, semakin banyak hukuman yang dapat dijatuhkan (Buzan & Hansen, 2007).

Terdapat dua aspek perbedaan antara kemampuan menghukum dan bertahan harus ditekankan. Pertama, seperti yang baru saja disarankan, kedua kemampuan dapat berkontribusi pada deterensi. Apakah suatu negara mencoba untuk mencegah musuh menyerang atau meyakinkan musuh untuk tidak melakukan perlawanan lebih lanjut setelah diserang, kedua kemampuan tersebut terkait dengan kemampuan negara untuk mempengaruhi tindakan musuhnya. Untuk membuat biaya kegagalan untuk mematuhi lebih besar daripada biaya untuk melakukannya, suatu negara harus memiliki, atau setidaknya tampaknya memiliki, kemampuan untuk benar-benar membebankan biaya yang cukup tinggi pada musuh. Inilah peran kemampuan menghukum suatu negara. Tetapi deterensi membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan untuk membebankan biaya. Musuh harus cukup yakin bahwa negara akan menggunakan kemampuannya. Penilaian ini tampaknya dipengaruhi oleh kemampuan negara untuk membatasi biaya yang dapat dibebankan oleh musuh sebagai pembalasan. Semakin besar kemampuan defensif suatu negara, semakin sedikit musuhnya dapat melukainya, dan semakin besar kemungkinannya untuk menggunakan kemampuannya pada musuhnya. Dengan demikian, kemampuan untuk menempatkan musuh dalam situasi yang kelanjutannya akan lebih mahal daripada pengorbanan yang diminta untuk dilakukan terkait dengan kemampuan menghukum dan bertahan. (Powell, 1990, pp. 7–8)

Poin kedua adalah bahwa kemampuan menghukum suatu negara terkait dengan kemampuan bertahan lawannya. Semakin besar kemampuan menghukum suatu negara, semakin tinggi biaya yang dapat dikenakan pada musuh, dan dengan demikian semakin lemah kemampuan fisik musuh untuk membatasi biaya yang dapat dikenakan padanya. Ada hubungan terbalik antara kemampuan menghukum suatu negara dan kemampuan bertahan musuhnya. Pada akhirnya, penting untuk ditekankan bahwa meskipun kedua kemampuan ini secara konseptual terpisah, kekuatan militer yang sebenarnya dapat menggabungkan kedua kemampuan ini. Pasukan yang mampu memukul mundur sebuah invasi dan dengan demikian membatasi biaya yang dapat dibebankan oleh musuh juga dapat digunakan untuk melancarkan invasi dan menimbulkan biaya pada musuh dengan mengambil sebagian wilayahnya. Dengan membantu membatasi biaya, tentara berkontribusi pada kemampuan pertahanan negara. Dengan mampu mengambil apa yang dinilai musuh, tentara berkontribusi pada kemampuan menghukum negara (Powell, 1990, pp. 9–11)

Meskipun telah banyak kebijakan dan strategi nuklir, teori deterensi nuklir umumnya mendekati masalah kredibilitas dari salah satu dari dua perspektif. Kedua pendekatan tersebut mencoba untuk menghubungkan kemungkinan penggunaan kekuatan dengan tujuan politik negara dalam apa yang tampaknya menjadi kasus yang paling sulit dan menuntut. Ini adalah gaya bahasa di mana kondisi kehancuran yang saling terjamin ditafsirkan dalam arti yang paling ketat. Dalam gaya ini, tidak ada keuntungan untuk meluncurkan serangan nuklir tanpa batas terlebih dahulu daripada yang kedua. Dalam hal pertukaran umum, tidak ada bedanya jika suatu

negara menyerang lebih dulu atau dipukul lebih dulu. Ini adalah interpretasi yang paling ketat, karena jika tidak ada keuntungan untuk menyerang terlebih dahulu, maka selama negara percaya bahwa ada sedikit kemungkinan peringatan dini salah dan musuh tidak menyerang, negara ini tidak akan melancarkan serangan umum. Itu selalu lebih baik untuk melakukan sesuatu yang lain. Dalam interpretasi yang paling ketat ini, tidak ada situasi di mana rasional bagi suatu negara untuk secara sengaja meluncurkan serangan nuklir tanpa batas terlebih dahulu. (Powell, 1990, p. 15)

Dari penjabaran diatas, dapat disimpulkan definisi teori deterensi adalah teori hubungan internasional yang menyatakan bahwa ancaman pembalasan militer, dalam bentuk respons militer yang kredibel, dapat mencegah perang ofensif maupun defensif. Teori ini didasarkan pada gagasan bahwa aktor yang rasional tidak akan memulai konflik jika mereka yakin bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukannya akan lebih besar daripada manfaatnya. Teori Deterensi telah digunakan untuk menjelaskan sejumlah peristiwa sejarah, termasuk Perang Dingin dan Krisis Rudal Kuba. Selain itu, juga digunakan untuk menginformasikan strategi militer saat ini, khususnya dalam konteks senjata nuklir.

2.1.4. Regional Security Complex

Salah satu tujuan menciptakan Regional Security Complex adalah untuk mengadvokasi tingkat regional sebagai yang tepat untuk sebagian besar analisis keamanan praktis. Biasanya, dua tingkat yang terlalu ekstrim mendominasi analisis keamanan: nasional dan global. Namun ada aspek lain, yaitu Kawasan. Keamanan Tingkat Kawasan atau Regional mengacu pada tingkat di mana negara bagian atau

unit lain terhubung cukup erat sehingga sekuritas mereka tidak dapat dianggap terpisah satu sama lain. Tingkat regional adalah di mana ekstrem keamanan nasional dan global saling mempengaruhi, dan di mana sebagian besar aksi terjadi. Gambaran umum adalah tentang hubungan dua tingkat: interaksi kekuatan global di tingkat sistem, dan kelompok saling ketergantungan keamanan yang erat di tingkat regional. Setiap RSC terdiri dari ketakutan dan aspirasi unit yang terpisah (yang pada gilirannya sebagian berasal dari fitur domestik dan fraktur). Baik keamanan unit-unit yang terpisah maupun proses intervensi kekuatan global hanya dapat dipahami dengan memahami dinamika keamanan regional (Hough, 2018).

Teori RSC dan teori keamanan secara umum dijelaskan oleh Buzan (1983) dalam Buzan dan Wæver (2003). Buzan mendefinisikan Regional Security Complex adalah sekelompok negara yang masalah keamanan utamanya terkait cukup erat sehingga sekuritas nasional mereka tidak dapat dianggap terpisah satu sama lain. Buzan dan Wæver (2003) juga mendefinisikan lagi RSC sebagai pelepasan fokus negara-sentris dan militer-politik dan untuk mengulangi konsepsi dasar yang sama untuk kemungkinan aktor yang berbeda dan beberapa sektor. keamanan: 'satu set unit yang proses utama sekuritisasi, desekuritisasi, atau keduanya saling terkait sehingga masalah keamanannya tidak dapat dianalisis atau diselesaikan secara wajar terpisah satu sama lain' (Buzan & Wæver, 2003, p. 43).

RSCT berguna karena tiga alasan. Pertama, ini memberi tahu kita sesuatu tentang tingkat analisis yang tepat dalam studi keamanan, kedua, dapat mengatur studi empiris, dan ketiga, skenario berbasis teori dapat dibuat berdasarkan kemungkinan bentuk dan alternatif RSC yang diketahui. RSC didefinisikan oleh

pola persahabatan (*amity*) dan permusuhan (*enmity*) yang bertahan lama dalam bentuk subglobal, pola saling ketergantungan keamanan yang koheren secara geografis. Karakter khusus dari RSC lokal akan sering dipengaruhi oleh faktor-faktor sejarah seperti permusuhan lama (Yunani dan Turki, Arab dan Persia, Khmer dan Vietnam), atau identitas budaya umum dari wilayah peradaban (Arab, Eropa, Asia Selatan, Asia Timur Laut, Amerika Selatan). Pembentukan RSC berasal dari interaksi antara, di satu sisi, struktur anarkis dan konsekuensi keseimbangan kekuatannya, dan di sisi lain tekanan kedekatan geografis lokal (Buzan & Wæver, 2003, p. 45).

Dari penjabaran diatas, dapat disimpulkan definsi Regional Security Complex (RSC) adalah sekelompok negara yang keamanannya saling berhubungan sehingga tidak mungkin menganalisis atau menyelesaikan masalah keamanan secara terpisah satu sama lain. RSC didefinisikan oleh pola persahabatan (*amity*) dan permusuhan (*enmity*) yang bertahan lama di subglobal, pola saling ketergantungan keamanan yang koheren secara geografis.

2.2. Kerangka Pemikiran

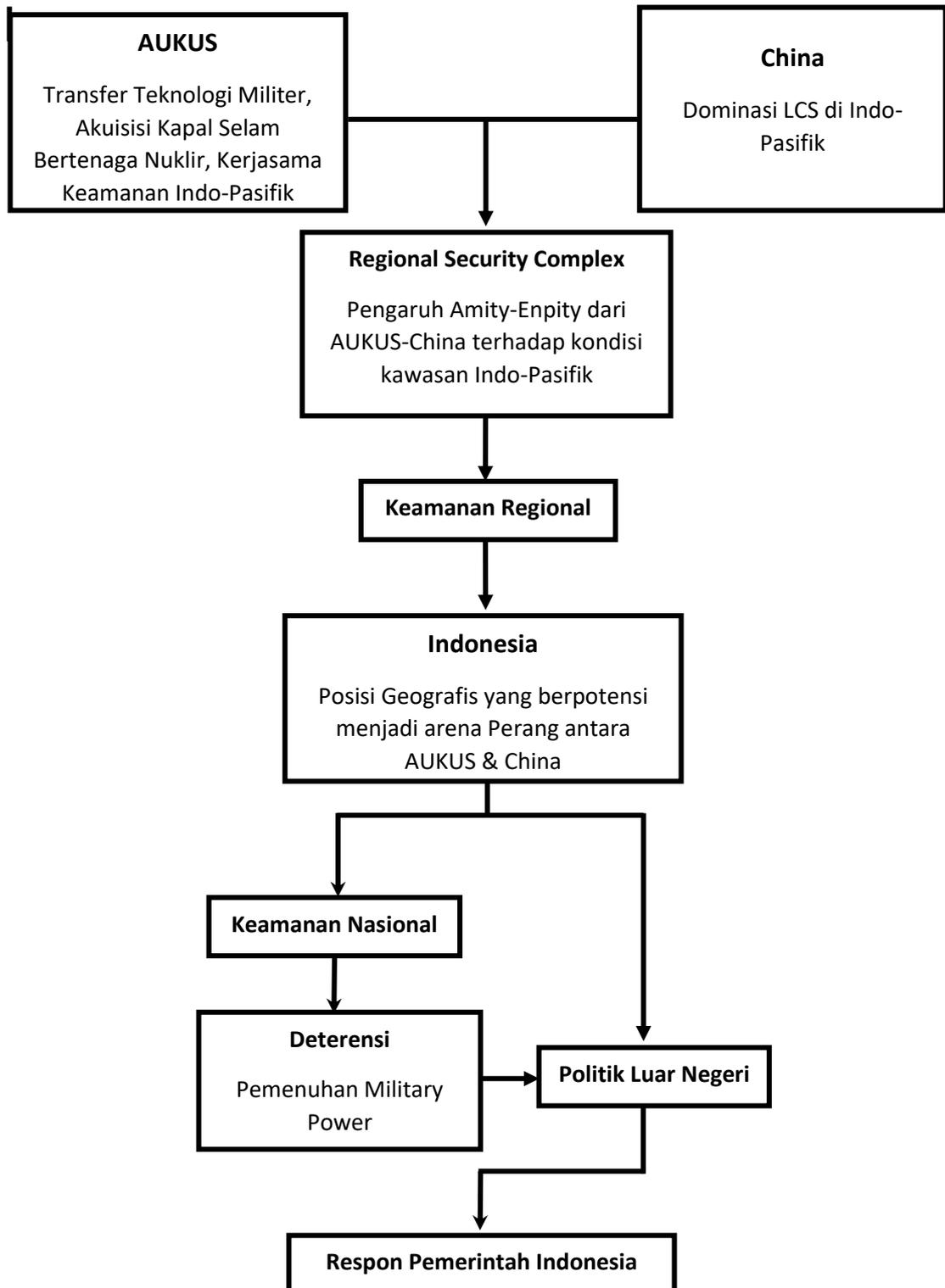
Kerangka Pemikiran merupakan model skema yang digunakan untuk menjelaskan alur pikir dalam penelitian ini. Melalui kerangka pemikiran peneliti menjelaskan masalah pokok dan variable-variabel yang mempengaruhi penelitian ini. Penjelasan terkait kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan dalam sebuah bagan alur.

Geopolitik di kawasan Indo-Pasifik terdiri dari empat kutub utama, yakni China, Jepang dan Korea Utara di Asia Timur, dan Australia di Pasifik. Jepang dan Taiwan bersekutu dengan Australia dan Amerika Serikat. Namun, China menunjukkan agresivitas di kawasan Laut China Selatan dengan mendeklarasikan Nine Dash Line. Hal tersebut menjadi ancaman bagi Australia karena semakin dekatnya ancaman geopolitik dari China. Maka dari itu, Australia merespon melalui pembentukan pakta pertahanan trilateral bersama Amerika Serikat dan Britania Raya bernama AUKUS.

Pembentukan AUKUS membuat Indonesia yang berada dalam *security dilemma* di tengah ketegangan geopolitik antara dua kutub tersebut. Kondisi *security dilemma* yang dialami Indonesia didasarkan pada posisi geografis Indonesia yang berada diantara dua kutub yang bersitegang dimana Indonesia memiliki tiga selat strategis yang menghubungkan Samudra Hindia dan Laut China Selatan, yakni Selat Sunda, Selat Bali dan Selat Makasar.. Selain itu, ancaman akibat pembentukan AUKUS didorong oleh rencana akuisisi kapal selam bertenaga nuklir kelas Virginia dari Amerika Serikat melalui AUKUS kepada Australia sebagai upaya melawan dominasi China di kawasan Indo-Pasifik. Kemampuan daya jelajah yang lebih lama serta tujuan akuisisi kapal selam bertenaga nuklir yang disponsori AUKUS akan mengancam Indonesia untuk dijadikan medan perang.

Atas dasar ancaman tersebut, Indonesia perlu membentuk kebijakan luar negeri strategis dalam merespon ketegangan Geopolitik yang terjadi pasca-pembentukan AUKUS. Dalam merespon ketegangan geopolitik yang terjadi, diperlukan kerangka analisis untuk mendeteksi ancaman serta solusi yang perlu

diambil oleh Indonesia. Kerangka teori dalam analisis yang diperlukan antara lain politik luar negeri, keamanan, regional security complex (RSC) dan kebijakan deterensi. Gambaran terkait kerangka pemikiran dapat dilihat melalui bagan dibawah.



Gambar 2 3 Kerangka Penelitian